

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2025



KACAMATAN KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO PROPINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Perubahan Perubahan Rencana Kerja (P- RENJA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Dokumen Perubahan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini merupakan wujud akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik di wilayah Kecamatan Kemlagi.

Dalam penyusunan dokumen ini masih jauh dari kreteria sempurna, masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharapkan beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk kesempurnaan dokumen dan pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen Perubahan Perubahan Rencana Kerja (P- RENJA) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan pada kita semua dalam melaksanakan tugas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2025


Pt. CAMAT KEMLAGI
NICKY SOCRATES, S.STP.,M.Si
Pembina
NIP. 19840425 200312 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Review terhadap Perubahan RKPD.....	22
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	
3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025.....	28
3.2. <i>Tagging</i> Tematik.....	36
BAB IV PENUTUP	
4.1. Catatan Penting.....	37
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	38
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan dan perubahan situasi dan kondisi dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap Renja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap perubahan asumsi, kebijakan nasional/daerah, kondisi ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perubahan ini juga mempertimbangkan perkembangan kondisi aktual, seperti refocusing anggaran, realokasi program, pergeseran prioritas pembangunan, atau penyesuaian terhadap target dan capaian kinerja.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengikuti pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang mengusung visi: “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.” Visi ini kemudian dijabarkan dalam lima misi pembangunan daerah, di mana Misi Ketiga yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2026. Sasaran Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah “Terwujudnya pelayanan publik yang optimal”.

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen induk tahunan pemerintah daerah, perubahan RKPD menjadi dasar utama bagi penyusunan perubahan Renja. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan, arah kebijakan,

dan plafon anggaran dalam Perubahan RKPD. Tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.” Kecamatan berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal untuk memastikan pelayanan cepat, tepat, bersih dan transparan.

Renstra Perangkat Daerah meskipun bersifat jangka menengah (5 tahunan), Renstra menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa perubahan Renja tetap dalam koridor sasaran strategis dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan Renja menjadi dasar teknokratis bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam merinci perubahan kegiatan, target output, dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas baru.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bukan hanya merupakan upaya administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah tetap adaptif, responsif, dan efektif menjawab tantangan pembangunan yang dinamis.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
30. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
33. Surat Keputusan Camat Kemlagi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Kemlagi 2021-2026;
34. Surat Keputusan Camat Kemlagi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025

dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dinamika dan perubahan yang terjadi, baik dari aspek kebijakan, kondisi keuangan, maupun kebutuhan pembangunan aktual. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 ini menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan capaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menyesuaikan program dan kegiatan dengan perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, maupun Daerah;
2. Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kondisi faktual, pagu indikatif anggaran, serta hasil evaluasi capaian kinerja;
3. Menjamin konsistensi dan sinergi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, RKPD) dengan dokumen penganggaran (RKA dan DPA);
4. Mengakomodasi masukan dan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.2. Review terhadap Perubahan RKPD

Membandingkan antara rancangan P-RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemaangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

3.2. *Tagging* Tematik

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menyebabkan ketidaktercapaian, ketercapaian, maupun capaian yang melampaui target. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar dalam melihat dampak capaian terhadap arah pembangunan jangka menengah serta sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat dan responsif ke depan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kemlagi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan progres yang cukup baik. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan II Tahun 2025 terdiri dari 3 program dan 9 kegiatan serta 20 sub kegiatan dengan anggaran Rp 2.949.064.000 dari hasil realisasi keuangan sebesar Rp 1.665.946.322 atau 43,51 % sedangkan realisasi kinerja 61,88 % (kategori sedang). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	OPD/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PRESENTASE (%)		KET.
		(Rp)	(Rp)	(Rp.)	KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KECAMATAN KEMLAGI						
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00%	2,00%	
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	33.630.000,00	18.500.745,00	15.129.255,00	55,01%	55,00%	
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26.623.950,00	15.012.800,00	11.611.150,00	56,39%	57,00%	
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.356.550,00	16.032.800,00	23.323.750,00	40,74%	41,00%	
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	85.089.500,00	55.169.200,00	29.920.300,00	64,84%	65,00%	
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%	2,00%	

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00%	2,00%	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.492.864.000,00	1.077.812.599,00	1.415.051.401,00	43,24%	43,00%	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.900.000,00	1.800.000,00	4.100.000,00	30,51%	31,00%	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.010.900,00	8.250.000,00	2.760.900,00	74,93%	75,00%	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.000.000,00	19.676.000,00	24.324.000,00	44,72%	45,00%	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.900.300,00	2.086.100,00	4.814.200,00	30,23%	31,00%	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.245.200,00	1.115.000,00	1.130.200,00	49,66%	50,00%	
14	Penyediaan Bahan/Material	28.366.050,00	4.842.320,00	23.523.730,00	17,07%	18,00%	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00%	100,00%	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.434.049,00	18.143.658,00	34.290.391,00	34,60%	35,00%	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.818.960,00	12.180.400,00	15.638.560,00	43,78%	44,00%	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.814.521,00	19.246.056,00	20.568.465,00	48,34%	54,00%	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.990.000,00	4.000.000,00	21.990.000,00	15,39%	18,00%	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.920.020,00	2.150.000,00	2.770.020,00	43,70%	46,00%	
	JUMLAH	2.949.064.000,00	1.283.117.678,00	1.665.946.322,00	43,51%		

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, realisasi keuangan
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :
 - a. Jadwal pelaksanaan yang tersebar sepanjang tahun serta belum masuk pada tahapan realisasi;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu :
 - a. Target Renstra tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan;
 - b. Menurunnya nilai evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - c. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah;
 - d. Program/kegiatan menjadi tidak cost-effective, berdampak pada evaluasi keuangan tahunan;
 - e. Membutuhkan revisi terhadap dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, dan APBD Perubahan);
 - f. Tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RPJPD) tidak tercapai sesuai waktu yang direncanakan.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu :
 - a. melaksanakan monitoring secara rutin pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kemlagi;
 - b. melakukan koordinasi lintas bidang dan optimalisasi manajemen pelaksanaan untuk menjaga konsistensi capaian dan efisiensi pelaksanaan program kedepannya;
 - c. memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada table berikut ini :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Kecamatan Kemlagi
2025

N o	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2025)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggara n renstra perangk at daerah s/d 2025 (%)	
										I		II							
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Nilai IKM(Nilai)					95,60											
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan(%)		139.014.267,00		86.171.100,00	100,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86.171.100,00		61,99
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan(pelayanan)		139.014.267,00		86.171.100,00	3.600,00	10.200.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		86.171.100,00		61,99
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha(laporan)					12,00	10.200.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	6,00					
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)		1.352.257.412,00		920.084.045,00	100,00	184.700.000,00	0,00	33.692.000,00	0,00	71.023.545,00	0,00	115.736.945,00		1.035.820.990,00		76,60
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(Dokumen)		1.353.940.383,00		920.084.045,00	54,00	184.700.000,00	0,00	33692000	0,00	71023545	0,00	115.736.945,00		1.035.820.990,00		76,50
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)					14,00	33.630.000,00	1,00	4.000.000,00	6,00	14.500.745,00	7,00	24.380.745,00				

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)				8,00	26.623.950,00	4,00	15.012.800,00	2,00	0,00	6,00	15.012.800,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)				12,00	39.356.550,00	3,00	7.441.400,00	2,00	8.591.400,00	5,00	17.532.800,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)				20,00	85.089.500,00	2,00	7.237.800,00	10,00	47.931.400,00	12,00	58.810.600,00				
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(inovasi)		13.922.479.935,00	9.155.122.470,00	2,00	2.754.164.000,00	0,00	532.047.244,00	0,00	646.354.889,00	0,00	1.330.475.804,00	10.485.598.274,00		75,31	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)		135.000.000,00	39.114.900,00	100,00	4.800.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	39.114.900,00		28,97	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				6,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				8,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		11.624.265.000,00	7.632.318.470,00	94,20	2.492.864.000,00	0,00	496311325	0,00	581501274	0,00	1.218.459.227,00	8.850.777.697,00		76,14	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orang/bulan)				16,00	2.492.864.000,00	16,00	496.311.325,00	0,00	581.501.274,00	16,00	1.218.459.227,00				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		861.639.614,00	607.791.870,00	99,00	105.522.450,00	0,00	11744000	0,00	33125420	0,00	48.671.420,00	656.463.290,00		76,19	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)				1,00	5.900.000,00	1,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1,00	1.800.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				1,00	11.010.900,00	0,00	0,00	0,50	8.250.000,00	0,50	8.250.000,00				

			Disediakan(Paket)															
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				1,00	44.000.000,00	1,00	3.283.000,00	0,00	16.393.000,00	1,00	21.391.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				1,00	6.900.300,00	1,00	907.000,00	0,00	1.179.100,00	1,00	3.986.100,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(laporan)				12,00	2.245.200,00	1,00	554.000,00	5,00	561.000,00	6,00	1.302.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				1,00	28.366.050,00	0,00	0,00	0,50	4.842.320,00	0,50	4.842.320,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12,00	7.100.000,00	3,00	5.200.000,00	3,00	1.900.000,00	6,00	7.100.000,00				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah (%)		390.000.000,00	251.442.625,00	99,00	80.253.009,00	0,00	14491919	0,00	15832139	0,00	34.649.101,00		286.091.726,00		73,36
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				12,00	52.434.049,00	3,00	10.023.759,00	3,00	8.119.899,00	6,00	20.234.621,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12,00	27.818.960,00	3,00	4.468.160,00	3,00	7.712.240,00	6,00	14.414.480,00				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)		497.315.810,00	277.433.705,00	99,00	70.724.541,00	0,00	9500000	0,00	15896056	0,00	28.696.056,00		306.129.761,00		61,56
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)				2,00	39.814.521,00	1,00	7.100.000,00	0,00	12.146.056,00	1,00	21.746.056,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				1,00	25.990.000,00	1,00	2.400.000,00	0,00	1.600.000,00	1,00	4.800.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)				1,00	4.920.020,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00				

			Nilai SAKIP(%)				82,90		0		0,00							
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)		135.000.000,00	39.114.900,00	100,00	4.800.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	39.114.900,00		28,97	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				6,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				8,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		11.624.265.000,00	7.632.318.470,00	94,20	2.492.864.000,00	0,00	496311325	0,00	581501274	0,00	1.218.459.227,00	8.850.777.697,00		76,14	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orang/bulan)				16,00	2.492.864.000,00	16,00	496.311.325,00	0,00	581.501.274,00	16,00	1.218.459.227,00				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		861.639.614,00	607.791.870,00	99,00	105.522.450,00	0,00	11744000	0,00	33125420	0,00	48.671.420,00	656.463.290,00		76,19	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)				1,00	5.900.000,00	1,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1,00	1.800.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				1,00	11.010.900,00	0,00	0,00	0,50	8.250.000,00	0,50	8.250.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				1,00	44.000.000,00	1,00	3.283.000,00	0,00	16.393.000,00	1,00	21.391.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				1,00	6.900.300,00	1,00	907.000,00	0,00	1.179.100,00	1,00	3.986.100,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(laporan)				12,00	2.245.200,00	1,00	554.000,00	5,00	561.000,00	6,00	1.302.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				1,00	28.366.050,00	0,00	0,00	0,50	4.842.320,00	0,50	4.842.320,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12,00	7.100.000,00	3,00	5.200.000,00	3,00	1.900.000,00	6,00	7.100.000,00				

3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		390.000.000,00		251.442.625,00	99,00	80.253.009,00	0,00	14491919	0,00	15832139	0,00	34.649.101,00		286.091.726,0 0		73,36
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12,00	52.434.049,00	3,00	10.023.759,00	3,00	8.119.899,00	6,00	20.234.621,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12,00	27.818.960,00	3,00	4.468.160,00	3,00	7.712.240,00	6,00	14.414.480,00				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)		497.315.810,00		277.433.705,00	99,00	70.724.541,00	0,00	9500000	0,00	15896056	0,00	28.696.056,00		306.129.761,0 0		61,56
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)					2,00	39.814.521,00	1,00	7.100.000,00	0,00	12.146.056,00	1,00	21.746.056,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					1,00	25.990.000,00	1,00	2.400.000,00	0,00	1.600.000,00	1,00	4.800.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi(unit)					1,00	4.920.020,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00				

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan dengan target kinerja 100% . Pada triwulan II Kinerja masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun. Sehingga dapat dilihat bahwa Predikat Penilaian Kinerja Sangat Rendah. Didalam program tersebut ada 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan .
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat , Capaian Kinerja pada Triwulan I adalah Sangat Tinggi, dengan Target Kinerja Triwulan I sebesar 200 Pelayanan terelasisasi 275 Pelayanan.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan, Capaian Kinerja pada Triwulan I adalah Sangat Tinggi, dengan target Kinerja pada Triwulan I adalah 3 laporan dan terealisasi 3 laporan.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100%. Pada triwulan I Kinerja masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun. Sehingga dapat dilihat bahwa Predikat Penilaian Kinerja Sangat Rendah. Pada program tersebut terdapat 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan penjelasan capaiankinerja sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa , Capaian Kinerja pada Triwulan 1 adalah sangat Tinggi , dengan target Kinerja 31 Fasilitasi sudah terealisasi 31 Fasilitasi.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa, Capaian Kinerja pada Triwulan I Sangat Tinggi , hal ini dikarenakan dari target 1 Kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana semua.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Capaian Kinerja pada triwulan I adalah Sangat Tinggi, hal ini dikarenakan dari target 4 Kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana semua yaitu kegiatan Asistensi Usulan Desa di SIPD, Musrenbang dan Kegiatan Koordinasi Bidang Pembangunan.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Capaian Kinerja Kinerja pada triwulan I adalah Sangat Tinggi hal ini dikarenakan dari target 3 Kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana semua yaitu kegiatan pemantauan wilayah serta dialog interaktif dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah dan pencegahan konflik
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga

Kemasyarakatan, Capaian Kinerja pada Triwulan I adalah sangat Tinggi dengan target 2 Kegiatan di Triwulan I sudah terlaksananya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu pelaksanaan Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas Kader PKK.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat daerah dengan target 81,5 (A), Capaian Kinerja pada Triwulan I masih belum dapat diukur hal ini dikarenakan Penilaian SAKIP masih belum dilaksanakan. Pada program tersebut ada 5 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan evaluasi kinerjanya sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja adalah Persentase Indikator program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target, Capaian Kinerja pada Triwulan I ini adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perangkat Daerah, Pada Triwulan I tercapai dengan predikat sangat Tinggi, semua target Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi yaitu sebanyak 2 Dokumen tersusunnya Rancangan Awal Renja 2026 dan Rancangan Renja 2026.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pada Triwulan I tercapai dengan predikat sangat Tinggi, semua target Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi yaitu sebanyak 7 Dokumen tersusunnya 3 Laporan Realisasi Anggaran, 1 Laporan LKjIP, 1 Laporan Keuangan, 1 Laporan LKPJ, 1 Perjanjian Kinerja.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 94,20% pada Triwulan I ini masih tercapai 19,22% dengan predikat Penilaian Sangat Tinggi.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan semua ASN Kecamatan Kemlagi telah menerima gaji sesuai dengan target yang telah ditentukan.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan. Capaian Kinerja pada Triwulan I ini adalah Sangat Tinggi dengan target kinerja 25% terealisasi sebesar 25%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang

Disediakan, pada Triwulan I ini capaian Kinerja Sangat Tinggi hal ini dikarenakan pengadaan komponen instalasi listrik berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pada Triwulan I ini capaian Kinerja Masih Sangat Rendah hal ini dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Paket.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 1 Paket.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Dokumen.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, pada Triwulan I ini capaian Kinerja Masih Sangat Rendah hal ini dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Laporan.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan Capaian Kinerja pada Triwulan I ini adalah Sangat Tinggi dengan target kinerja 25% terealisasi sebesar 25% yang terdiri dari:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 6 Laporan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Kinerja

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Laporan.

- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik, pada Triwulan I ini adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Indikator Kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Rendah dikarenakan Kendaraan Dinas Kecamatan Kemlagi kebanyakan terealisasi di akhir tahun.
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada Triwulan I ini Capaian Kinerja nya Sangat Rendah dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, pada Triwulan I ini Capaian Kinerja nya Sangat Rendah dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.

2.2 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2025) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk dilakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.

Dalam upaya pencapaian tujuan strategis RPJMD yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel, dan Responsif.” Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen RKPD 2025 Kabupaten Mojokerto disusun dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah: “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan

Responsif.” Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kecamatan adalah 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;. Sesuai dengan Pagu anggaran indikatif dalam Perubahan RKPD 2025 sebesar Rp. 3.313.564.000,00 yang bisa dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.1. RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

KECAMATAN : KEMLAGI

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Perubahan)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Danan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Kemlagi		2,820,111,400	PAD			2,807,698,100
7.01.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	Kecamatan Kemlagi	100%	4,800,000	PAD		100%	5,700,000
7.01.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kemlagi	6 Dokumen	3,000,000	PAD		6 Dokumen	3,500,000
7.01.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kemlagi	8 Laporan	1,800,000	PAD		8 Laporan	2,200,000
7.01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kecamatan Kemlagi	95	2,492,864,000	PAD		95	2,492,864,000
7.01.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kemlagi	18 Orang/bulan	2,492,864,000	PAD		18 Orang/bulan	2,492,864,000
7.01.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Kecamatan Kemlagi	90%	103,532,370	PAD		90%	84,811,550
7.01.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 paket	5,900,000	PAD		1 paket	6,200,000

7.01.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 paket	8,570,800	PAD		1 paket	15,000,000
7.01.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Kemlagi	12 paket	44,000,000	PAD		12 paket	19,000,000
7.01.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	2 paket	6,900,300	PAD		2 paket	6,900,300
7.01.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	12 bulan	2,245,200	PAD		12 bulan	2,245,200
7.01.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Kecamatan Kemlagi		28,816,070	PAD			28,366,050
7.01.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kemlagi		7,100,000	PAD			7,100,000
7.01.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kecamatan Kemlagi	90%	69,349,821	PAD		90%	80,253,009
7.01.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	12 laporan	41,530,861	PAD		12 laporan	52,434,049
7.01.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Kemlagi	12 laporan	27,818,960	PAD		12 laporan	27,818,960
7.01.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Kemlagi	1 unit	149,565,209	PAD		1 unit	144,069,541
7.01.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kemlagi		39,814,521	PAD			39,814,521

7.01.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Kemlagi		105,280,688	PAD			99,335,000
7.01.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Kemlagi		4,470,000	PAD			4,920,020
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Kemlagi		10,200,000	PAD			10,200,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Kemlagi	12 Laporan	10,200,000	PAD		12 Laporan	10,200,000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksana naan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Kemlagi	12 Laporan	10,200,000	PAD			10,200,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kemlagi		483,252,600	PAD			274,610,500
7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kecamatan Kemlagi	54 Dokumen	483,252,600	PAD		54 Dokumen	274,610,500
7.01.06.2.01.0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kemlagi	14 Dokumen	39,630,000	PAD		14 Dokumen	33,630,000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kemlagi	5 Dokumen	25,123,950	PAD		5 Dokumen	26,623,950

7.01.06.2.01.001 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kemlagi	15 Dokumen	331,762,050	PAD		15 Dokumen	39,356,550
7.01.06.2.01.001 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Kemlagi	20 Dokumen	86,736,600	PAD		20 Dokumen	175,000,000
					3,313,564,000				3,092,508,600

2.3 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada di kecamatan Kemlagi melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Kemlagi secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Kemlagi
Kabupaten Mojokerto

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Masjid Al Hidayah Desa Kemlagi	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Ekor Hewan Qurban Idul Adha	Hibah Sapi untuk Desa 1

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan melihat data capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Kemlagi sampai dengan Tribulan I yang masih rendah, diperlukan upaya-upaya percepatan realisasi baik untuk realisasi kinerja dan keuangan. Namun demikian ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang mengajukan perubahan anggaran karena adanya tambahan kegiatan. Perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kemlagi untuk Tahun Anggaran 2025, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya, serta penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Pada Perubahan rencana Kerja 2025 ada beberapa penambahan dan pengurangan anggaran di beberapa Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkurang Rp. 1.100.000,00 , kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bertambah sebesar Rp. 10.409.920,00 , kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkurang Rp. 10.903.188,00, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah Rp. 78.840.688,00
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada:
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa ada penambahan anggaran sebesar Rp. 5.600.000,00 dari sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dan berkurang Rp. 2.400.000,00 dari sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ada penambahan anggaran sebesar Rp. 292.405.500,00 dimana akan dipergunakan untuk Anggaran Wawasan Kebangsaan dan juga penambahan Honorarium Tim Forkopimcam.

TABEL T-C.33.

**Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto**

Kecamatan Kemlagi

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		ANGGARAN		TAMBAH (KURANG)
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
7.01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	2,742,864,000	2,820,111,400	77,247,400
7.01.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100%	100%	5,900,000	4,800,000	(1,100,000)
7.01.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	3,000,000	3,000,000	-
7.01.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	2,900,000	1,800,000	(1,100,000)
							-
7.01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	95%	2,492,864,000	2,492,864,000	-
7.01.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2,492,864,000	2,492,864,000	-
							-
7.01.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90%	90%	93,122,450	103,532,370	10,409,920

Perubahan Renja 2025 Kecamatan Kemlagi

7.01.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,900,000	5,900,000	-
7.01.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11,010,900	8,570,800	(2,440,100)
7.01.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19,000,000	44,000,000	25,000,000
7.01.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,900,300	6,900,300	-
7.01.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,245,200	2,245,200	-
7.01.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28,366,050	28,816,070	450,020
7.01.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	19,700,000	7,100,000	(12,600,000)
							-
7.01.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	80,253,009	69,349,821	(10,903,188)
							-
7.01.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52,434,049	41,530,861	(10,903,188)

7.01.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27,818,960	27,818,960	-
							-
7.01.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	70,724,541	149,565,209	78,840,668
7.01.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	39,814,521	39,814,521	-
7.01.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25,990,000	105,280,688	79,290,688
7.01.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	4,920,020	4,470,000	(450,020)
							-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	97.50%	97.50%	10,200,000	10,200,000	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	745 Pelayanan	745 Pelayanan	10,200,000	10,200,000	-
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	10,200,000	10,200,000	-

							-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54	54	189,800,000	483,252,600	293,452,600
7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	189,800,000	483,252,600	293,452,600
7.01.06.2.01.0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	34,030,000	39,630,000	5,600,000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	27,523,950	25,123,950	(2,400,000)
7.01.06.2.01.0011	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	8 Dokumen	39,356,550	331,762,050	292,405,500
7.01.06.2.01.0012	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 Dokumen	24 Dokumen	88,889,500	86,736,600	(2,152,900)
					2,942,864,000	3,313,564,000	370,700,000

3.1. Tagging Tematik

Berikutnya dilakukan tagging kegiatan tematik sebagai salah satu mekanisme strategis untuk menandai kontribusi nyata perangkat daerah terhadap agenda pembangunan yang bersifat lintas bidang, mendesak, dan berdampak langsung pada masyarakat. Tagging kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknokratis dalam penelusuran belanja publik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin bahwa sumber daya fiskal digunakan secara tepat sasaran dan mendukung prioritas bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dengan memanfaatkan pendekatan tagging, Kecamatan ikut serta mendorong keterpaduan antara logika intervensi kelembagaan dengan arah kebijakan nasional seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, pengendalian inflasi, dan percepatan transformasi digital pemerintahan. Di tingkat daerah, mekanisme ini juga menjadi sarana untuk memetakan kontribusi nyata perangkat daerah dalam menjawab isu strategis lokal sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen RPJMD 2025-2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Adapun daftar tagging subkegiatan dilingkup Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang mendukung program/kegiatan tematik tersebut tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	ANGGRAN PERUBAHAN 2025										
			KAB U PATE N LAYA K ANAK	KABU P ATEN SEHA T	SPM	STU N TING	KEMI SKIN A N EKS REM	S D G' S	RA N HA M	GENDER	KU M UH	INFRASTR U KTUR	VISI MISI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah								2,820,111,400			2,820,111,400
7.01.01.2. 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target								4,800,000			4,800,000
7.01.01.2. 0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								3,000,000			3,000,000
7.01.01.2. 0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1,800,000			1,800,000
7.01.01.2. 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah								2,492,864,000			2,492,864,000
7.01.01.2. 0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								2,492,864,000			2,492,864,000
7.01.01.2. 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah								-			-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya											-
7.01.01.2. 0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan											-
7.01.01.2. 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan								103,532,370			103,532,370
7.01.01.2. 0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								5,900,000			5,900,000

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								8,570,800			8,570,800
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								44,000,000			44,000,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								6,900,300			6,900,300
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								2,245,200			2,245,200
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan								28,816,070			28,816,070
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								7,100,000			7,100,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi								-			-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								-			-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan								69,349,821			250.500.000

7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								41,530,861			41,530,861
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								27,818,960			27,818,960
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik								149,565,209			149,565,209
7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								39,814,521			39,814,521
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								105,280,688			105,280,688
7.01.01.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								4,470,000			4,470,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan								10,200,000			10,200,000
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan								10,200,000			10,200,000
7.01.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan								10.200.000			10.200.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti								483,252,600			483,252,600
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat								483,252,600			483,252,600
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa								39,630,000			39,630,000
7.01.06.2.0 1.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								25,123,950			25,123,950

7.01.06.2.0 1.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								331,762,050			331,762,050
7.01.06.2.0 1.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								86,736,600			86,736,600
JUMLAH										3,313,564,000		3,313,564,000	

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, baik dari sisi kebijakan, capaian program, maupun kebutuhan masyarakat yang muncul sepanjang tahun berjalan. Perubahan Renja ini merupakan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, serta tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Kemlagi dapat berjalan lebih adaptif, terarah, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, serta sebagai instrumen evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Kemlagi.

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025

- a. Perubahan Renja Kecamatan harus selaras dan konsisten dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja semester sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangan;
- c. Aspirasi masyarakat dan hasil Musrenbang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif;
- d. Perubahan kegiatan/program harus mempertimbangkan kemampuan riil anggaran, termasuk kebijakan refocusing atau penghematan belanja;
- e. Penyusunan perubahan Renja harus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama OPD teknis dan Bappeda, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas sektor atau dukungan teknis dari dinas lain;
- f. Proses penyusunan Perubahan Renja wajib mengikuti jadwal dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh Bappeda sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Perubahan Renja harus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025

- a. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan harus mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan Renja harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Penyusunan harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan aktual;
- d. Proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan pemangku kepentingan utama;
- e. Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala;
- f. Penyusunan harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran;

4.3. Rencana Tindak Lanjut dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan OPD yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan Kecamatan;
- b. Memastikan kesesuaian antara usulan Kecamatan dengan program prioritas OPD teknis;
- c. Menyelaraskan hasil Perubahan Renja Kecamatan dengan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- d. Menyampaikan hasil Perubahan Renja kepada seluruh unit kerja dan perangkat kecamatan;
- e. Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sesuai hasil perubahan untuk semester selanjutnya;
- f. Menyusun rencana pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Perubahan Renja.

Akhirnya, penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Kecamatan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan secara berkelanjutan.

Mojokerto, Juni 2025

KAMAT KEMLAGI



NICKY SOCRATES, S.STP.,M.Si

Pembina

NIP. 19840425 200312 1001